

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Nuning Nugrahani, S.PT, M.Si
NIP. 19740619 200112 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pemnyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Nuning Nugrahani, S.PT, M.Si ✎
NIP. 19740619 200112 2 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.662.985.123,00 atau mencapai 100% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.658.032.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp6.984.851.958,00 atau mencapai 98,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.070.922.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.761.712.948,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp836.730.580,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp32.923.279.521,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp770.652.730,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.702.847,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp33.761.712.948,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.656.698.414,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.392.299.733,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.735.601.319,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp-5.735.601.319,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.735.601.319,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp34.200.447.432,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.735.601.319,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-25.000.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.321.866.835,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp33.761.712.948,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.658.032.000,00	1.662.985.123,00	100	4.685.554.772,00
Jumlah Pendapatan		1.658.032.000,00	1.662.985.123,00	100	4.685.554.772,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1.250.055.000,00	1.242.016.232,00	99	1.324.563.973,00
Belanja Barang	B.4.	5.820.867.000,00	5.742.835.726,00	99	9.653.592.531,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja		7.070.922.000,00	6.984.851.958,00	98,78	10.978.156.504,00

II. NERACA

**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	1.541.305.460,00	1.572.592.169,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-770.652.730,00	-786.296.085,00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4.	770.652.730,00	786.296.084,00
Persediaan	C.1.5.	66.077.850,00	61.270.850,00
Jumlah Aset Lancar		836.730.580,00	847.566.934,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	27.990.850.000,00	27.990.850.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.806.345.403,00	7.806.345.403,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.210.232.000,00	5.210.232.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	39.792.100,00	39.792.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-8.123.939.982,00	-7.696.058.996,00
Jumlah Aset Tetap		32.923.279.521,00	33.351.160.507,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	55.290.000,00	55.290.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-53.587.153,00	-53.570.009,00
Jumlah Aset Lainnya		1.702.847,00	1.719.991,00
Jumlah Aset		33.761.712.948,00	34.200.447.432,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	33.761.712.948,00	34.200.447.432,00
Jumlah Ekuitas		33.761.712.948,00	34.200.447.432,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		33.761.712.948,00	34.200.447.432,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.656.698.414	2.196.351.709
JUMLAH PENDAPATAN		1.656.698.414	2.196.351.709
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.242.016.232	1.324.563.973
Beban Persediaan	D.3.	362.483.000	832.365.100
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.628.483.866	5.514.335.199
Beban Pemeliharaan	D.5.	645.063.634	1.181.781.955
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.101.998.226	2.169.303.427
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D.8.	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	427.898.130	612.599.346
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	-15.643.355,00	0,00
JUMLAH BEBAN		7.392.299.733	11.634.949.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.735.601.319	-9.438.597.291
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	6.745.800
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-5.735.601.319	-9.431.851.491
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.735.601.319	-9.431.851.491

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	34.200.447.432,00	35.662.092.689,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-5.735.601.319,00	-9.431.851.491,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-25.000.000,00	2.209.163.752,00
Lain-Lain	E.3.	-25.000.000,00	2.216.663.752,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.321.866.835,00	5.761.042.482,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-438.734.484,00	-1.461.645.257,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	33.761.712.59394800	34.200.447.432,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pelaksanaan layanan informasi, penyiapan bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tidak berwujud di bidang pertanian. Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian didirikan sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah satu-satu wujud inovasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Plutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengrajaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka PendekSuatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang pagunya masih dibintangi dan unlock sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut hanya pembukaan pemblokiran pada pagu kegiatan:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	780.000.000,00	1.658.032.000,00
Jumlah Pendapatan	780.000.000,00	1.658.032.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.423.713.000,00	1.232.055.000,00
Belanja Lembur	18.000.000,00	18.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.653.414.000,00	1.671.834.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.705.996.000,00	1.676.447.000,00
Belanja Barang Persediaan	276.500.000,00	367.400.000,00
Belanja Jasa	407.800.000,00	356.639.000,00
Belanja Pemeliharaan	764.746.000,00	645.337.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	740.000.000,00	1.103.210.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.990.169.000,00	7.070.922.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.662.985.123.000,00 atau mencapai 100% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.658.032.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Akun Pendapatan	2023		
	Anggaran	Realisasi	[%]
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.658.032.000,00	1.662.985.123,00	100
Jumlah	1.658.032.000,00	1.662.985.123,00	100

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 64,98% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0,00	0,00	-
Pendapatan Lain-Lain	0,00	4.497.200,00	0,00
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.662.985.123,00	2.570.002.349,00	64,98
Jumlah	1.662.985.123,00	2.574.499.549,00	64,98

Pendapatan royalti atas kekayaan intelektual mengalami penurunan di TA 2023 hal ini disebabkan karena adanya perubahan tusi atau transisi organisasi yang sebelumnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dan sekarang menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp6.984.851.958,00 atau 98,78% dari anggaran belanja sebesar Rp7.070.922.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	1.250.055.000,00	1.242.386.368,00	99
Belanja Barang	5.820.867.000,00	5.742.835.726,00	99
Belanja Modal	0,00	00,00	0
Total Belanja Kotor	7.070.922.000,00	6.985.222.094,00	98,66
Pengembalian Belanja	0,00	370.136,00	0,00
Total Belanja	7.070.922.000,00	6.984.851.958,00	98,78

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 157,17% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Laporan Keuangan Semester II TAHUN ANGGARAN 2023

1. tidak adanya belanja modal di TA 2023
2. Penurunan pagu anggaran BISIP pada DIPA TA 2023
3. tidak bisa digunakan seluruhnya dana pnbp dikarenakan perubahan tusi Satker (hanya diperbolehkan untuk imbalan bagi inventor) sesuai revisi DIPA DJA.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	1.242.016.232,00	1.324.563.973,00	1,02
Belanja Barang	5.742.835.726,00	9.653.592.531,00	1,53
Belanja Modal	0,00	0,00	0
Total Belanja	6.984.851.958,00	10.978.156.504,00	157,17

Berikut penjelasan Belanja Barang penanganan COVID 19:

KDKEGIATAN	KDO UTP UT	AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	SISA	PENGUNA AN BELANJA *Merujuk pada SE DJPB.0369_2022
6918.EBA.994	002	521131	- Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh - Penyemprotan desinfektan area kantor dan sekitarnya	85.500.000	85.445.000	55.000	
6918.EBA.994	002	521841	Pembelian masker dan handsanitizer	0	0	0	
6918.EBA.994	002	522192	Rapid test dan PCR	0	0	0	

Belanja barang penanganan covid 19 pada Satker BISIP hanya pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh sebesar Rp85.445.000,00 pada semester I TA 2023.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.242.016.232,00 dan Rp1.324.563.973,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 1,07% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang pensiun (purnabakti) sebanyak 1 orang a.n Tjipto Rahayu, A.Md

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.242.386.368,00	1.324.564.180,00	1,07
Jumlah Belanja Kotor	1.242.386.368,00	1.324.564.180,00	1,07
Pengembalian Belanja Pegawai	370.136,00	207,00	0
Jumlah Belanja	1.242.016.232,00	1.324.563.973,00	1,07

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.257.009.762,00 dan Rp4.990.355.067,00. Realisasi belanja barang Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 59,49% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pemblokiran pagu sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.
2. Tidak bisa digunakan seluruhnya dana pnbp dikarenakan perubahan tusi Satker (hanya diperbolehkan untuk imbalan bagi inventor) sesuai revisi DIPA DJA.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.657.358.800,00	1.643.011.895,00	1,01
Belanja Barang Non Operasional	1.645.296.269,00	3.302.123.800,00	49,83
Belanja Barang Persediaan	367.290.000,00	788.921.950,00	46,56

Belanja Jasa	325.828.797,00	569.199.504,00	57,24
Belanja Pemeliharaan	645.063.634,00	1.181.031.955,00	54,62
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.101.998.226,00	2.169.303.427,00	50,80
Jumlah Belanja Kotor	5.742.835.726,00	9.653.592.531,00	59,49
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.742.835.726,00	9.653.592.531,00	59,49

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada SEMESTER II TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya belanja modal di TA 2023

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin di TA 2023

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak adanya belanja modal gedung dan bangunan di TA 2023

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Uang Muka dari KPPN	0,00
Jumlah	0,00

Uang Persediaan (UP) sebesar Rp120.000.000,00 dan sudah nihil.

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.541.305.460,00 dan Rp1.572.592.169,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.541.305.460,00	1.572.592.169,00
Jumlah	1.547.592.169,00	1.572.592.169,00

Terdapat temuan BPK RI atas keterlambatan pembayaran royalti/ piutang bukan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp274.316.432,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.313.054.251,00 selanjutnya pada tahun 2020 Rp2.160.821.184,00 dan pada tahun 2021 piutang bukan pajak sebesar Rp2.160.821.184,00 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.1.572.592.169,00 (ada setoran sebesar Rp.531.587.022,00 ditahun 2022). Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundng-undangan pada Kementerian Pertanian tahun 2019 s.d tahun 2023 di Balai PATP dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan royalti tahun 2019 dipotong pajak penghasilan (PPh) oleh perusahaan/ mitra sebesar Rp1.752.849.931,85 dan diantaranya sebesar Rp750.802.21,41 belum didukung dengan Surat Setoran Pajak (SSP) serta pendapatan royalti yang belum diterima oleh BPATP sebesar Rp1.159.744.301,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp153.308.950 yang belum dibayarkan sehingga piutang pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.313.053.251,00.
- Pada tahun 2020 adanya temuan sebesar Rp791.125.940,00 sehingga piutang bukan pajak pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.104.179.191,00
- Pada tahun 2021 terdapat denda yang belum dikenakan kepada perusahaan/mitra yang terlambat menyetorkan pendapatan royalti sebesar Rp473.02.843,67 (tidak masuk kedalam neraca hasil kesepakatan dengan BPK RI hanya pencatatan denda piutang saja). Sehingga piutang pada neraca BPATP tetap sebesar Rp2.104.179.191,00.
- Pada tahun 2022 adanya setoran sebesar Rp.531.587.022,00 terkait temuan tersebut, sehingga piutang BPATP menjadi Rp1.572.592.169,00.
- Pada tahun 2023 piutang bukan pajak menjadi sebesar Rp1.547.592.169,00 dikarenakan adanya setoran senilai Rp25.000.000 pada tahun 2022 yang belum diinput di tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 dilakukan koreksi pencatatan pada aplikasi sakti, sehingga piutang pada tahun 2023 sebesar Rp1.547.592.169,00.
- Pada tanggal 29 September 2023 ada setoran piutang sebesar Rp6.286.709,00 dari PT. Bio Industri Nusantara sehingga piutang bukan pajak menjadi sebesar Rp1.541.305.460,00.

Balai PATP yang sekarang menjadi BISIP segala upaya sudah dilakukan namun dikarenakan adanya perusahaan yang kolep/ bangkrut yang menyebabkan tidak bisa membayar piutang tersebut.

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-770.652.730,00 dan Rp-786.296.085,00 tidak ada pergeseran pada penyisihan piutang di semester II tahun 2023 dikarenakan setoran piutang di Triwulan III yang menyebabkan tidak boleh bergerak untuk penyisihan piutang dan sudah dilakukan tutup buku permanen.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	1.541.305.460,00	50%	-770.652.730,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp66.077.850,00 dan Rp61.270.850,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	66.077.850,00	61.270.850,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Jumlah	66.153.350,00	61.270.850,00

Persediaan pada BISIP berupa barang konsumsi senilai Rp66.077.850,00.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.990.850.000,00 dan Rp27.990.850.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.806.345.403,00 dan Rp7.806.345.403,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.806.345.403,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00

Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	7.806.345.403,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-7.348.676.395,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	457.669.008,00

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin pada TA 2023.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.210.232.000,00 dan Rp5.210.232.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2022	5.210.232.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	5.210.232.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-775.263.587,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.434.968.413,00

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan pada TA 2023.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.792.100,00 dan Rp39.792.100,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-8.123.939.982,00 dan Rp-7.696.058.996,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.806.345.403,00	-7.348.676.395,00	457.669.008,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.210.232.000,00	-775.263.587,00	4.434.968.413,00
3.	Aset Tetap Lainnya	39.792.100,00	0,00	39.792.100,00
Akumulasi Penyusutan		13.056.369.503,00	-8.123.939.982,00	4.932.429.521,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp55.290.000,00 dan Rp55.290.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	700.000,00
Hak Cipta	1.200.000,00
Software	53.390.000,00
Jumlah	55.290.000,00

Pembahasan mengenai ATB di BISIP masih dalam proses dan belum ada titik temu. Permasalahan Aset Tak Berwujud (ATB) di BISIP dan penyusunan Petunjuk Umum untuk tingkat Kementerian Pertanian dan Petunjuk Teknis untuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Telah dilakukan pertemuan antara pihak Biro Keuangan dan BMN, Inspektorat Jenderal 3 Kementerian, BSIP dan BISIP untuk membuat Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis ATB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud dan saat ini dalam proses penyusunan di Kementerian Pertanian. Aset Tak Berwujud berupa software masih dalam kondisi baik dan masih digunakan diruang server BISIP.

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-53.587.153,00 dan Rp-53.570.009,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	55.290.000,00	-53.587.153,00	1.702.847,00
	Akumulasi Penyusutan	55.290.000,00	-53.587.153,00	1.702.847,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN pada tahun 2023 merupakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp120.000.000,00 yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dan sudah dinihilkan pada tanggal 05 Januari 2024. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga sebesar 0,00 merupakan gaji pns, p3k, maupun gaji ppnppn yang belum terbit SP2D.

C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp0,00 berupa pengembalian TUP sebesar dan GUP yang belum dibuatkan SPP dan SPM.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.761.712.948,00 dan Rp34.200.447.432,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.761.712.948,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.34.200.447.432,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.656.698.414,00 dan Rp2.196.351.709,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.656.698.414,00	2.196.351.709,00	24,57
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.656.698.414,00	2.196.351.709,00	24,57

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal yang bersumber dari pendapatan royalti atas kekayaan intelektual (Royalti hasil kerjasama dengan pihak ke tiga) pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,57% dibandingkan pendapatan tahun 2022.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.242.016.232,00 dan Rp1.324.563.973,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	879.155.200,00	960.430.380,00	0,92
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.425,00	12.720,00	0,98
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-136,00	0,00	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	17.328.130,00	18.570.532,00	0,93
Beban Tunj. Beras PNS	45.190.080,00	49.824.960,00	0,91
Beban Tunj. Fungsional PNS	44.240.000,00	38.438.000,00	1,15
Beban Tunj. PPh PNS	3.505.127,00	2.974.591,00	1,18

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Struktural PNS	15.120.000,00	23.940.000,00	0,63
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59.543.130,00	60.913.790,00	0,98
Beban Tunjangan Umum PNS	30.155.000,00	34.410.000,00	0,88
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-370.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Lembur	17.989.000,00	17.949.000,00	1,00
Beban Uang Makan PNS	111.526.000,00	117.100.000,00	0,95
Beban Gaji Pokok PPPK	11.866.000,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	316,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.186.600,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	474.640,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.160.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.158.720,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PPPK	1.776.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.242.016.232,00	1.324.563.973,00	6,23

Beban pegawai mengalami penurunan dikarenakan adanya pegawai yang pensiun sebanyak 1 orang dan 2 pegawai PPNPN yang mutasi (diterima sebagai PPPK di Satker lain) sehingga mengalami penurunan sebesar 6,23 persen.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp362.483.000,00 dan Rp832.365.100,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0,00	0,00	0
Beban Persediaan konsumsi	362.483.000,00	832.365.100,00	56,45
Jumlah	362.483.000,00	832.365.100,00	56,45

Beban persediaan barang konsumsi sebesar Rp.362.483.000,00 yang mengalami penurunan sebesar 56,45%.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.628.483.866,00 dan Rp5.514.335.199,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	236.893.000,00	254.720.000,00	0,93
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.408.403.269,00	2.420.880.000,00	58,18
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	85.445.000,00	174.517.500,00	48,96
Beban Barang Operasional Lainnya	59.364.000,00	26.819.000,00	45,18
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	141.792.000,00	141.792.000,00	0,00
Beban Jasa Profesi	81.000.000,00	134.700.000,00	60,13
Beban Keperluan Perkantoran	1.293.467.800,00	1.261.692.850,00	97,54
Beban Langganan Air	27.146.100,00	40.917.800,00	66,34
Beban Langganan Listrik	118.058.390,00	98.842.257,00	83,72
Beban Langganan Telepon	1.624.307,00	1.881.697,00	86,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	63.000.000,00	36.000.000,00	57,14
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.290.000,00	20.690.545,00	69,07
Beban Sewa	8.000.000,00	46.372.000,00	17,25
Beban Jasa Lainnya	90.000.000,00	113.977.000,00	7,90
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	254.720.000,00	0,00
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	987.750,00	0,00
Jumlah	3.628.483.866,00	5.514.335.199,00	34,19

Beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 34,19% seperti belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja covid 19, belanja langganan air, belanja jasa profesi, belanja pengiriman surat dinas pos dan belanja jasa.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp645.063.634,00 dan Rp1.181.781.955,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.956.681,00	788.820.000,00	32,07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	392.106.953,00	392.211.955,00	1,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	750.000,00	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	645.063.634,00	1.181.781.955,00	45,41

Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 45,41% dari biaya pemeliharaan berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan persediaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.101.998.266,00 dan Rp2.169.303.427,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	978.788.266,00	1.710.478.427,00	57,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	123.210.000,00	458.825.000,00	26,85
Jumlah	1.101.998.226,00	2.169.303.427,00	49,20

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 49,20% dikarenakan pemblokiran pagu pnbp yang belum dapat digunakan.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp427.898.130,00 dan Rp612.599.346,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Hak Cipta	17.144,00	17.144,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.713.384,00	126.713.384,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	301.167.602,00	485.868.818,00	30,15
Jumlah	427.898.130,00	612.599.346,00	30,15

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar 30,15%.

D.10. Beban Barang Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang

Jumlah Beban Barang Bantuan Sosial untuk pemberdayaan social dalam bentuk barang Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00. Beban Barang Bantuan Sosial untuk pemberdayaan social dalam bentuk barang Kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Bantuan Sosial untuk pemberdayaan social dalam bentuk barang	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindah tanginan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-5.735.601.319,00	-9.438.597.291,00	39,23
Jumlah	-5.735.601.319,00	-9.438.597.291,00	39,23

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.200.447.432,00 dan Rp35.662.092.689,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-5.735.601.319,00 dan Rp-9.431.851.491,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-25.000.000,00 dan Rp2.209.163.752,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.321.866.835,00 dan Rp5.761.042.482,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.984.851.958,00
Diterima dari Entitas Lain	-662.985.123,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah	5.321.866.835,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.662.985.123,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.984.851.958,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2023.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090200648680000KD	0,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090200648680000KD	0,00
Jumlah			0,00

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-438.734.484,00 dan Rp-1.461.645.257,00.

E.6. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.761.712.9848,00 dan Rp34.200.447.432,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian telah melakukan revisi DIPA sebanyak 7 kali pada tahun anggaran 2023 dari DIPA Awal dikarenakan pembukaan pemblokiran (unlock) dan revisi pagu anggaran.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2023 Nomor: 105/Kpts/OT.160/H.1.1/5/2023 tanggal 06 Mei 2023 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penandatangan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada BISIP telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan:

Sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Nuning Nugrahani, S.PT, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si
Pejabat	: Ade Rachmat Santosa, S.Sos
Penandatangan/Penguji SPM	
Bendahara Pengeluaran	: Hening Kartika S
Bendahara Penerimaan	: Titin Parlina, S.AP